

BAB II

SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT TANJUNG PRIOK MENJELANG TERJADINYA PERISTIWA TANJUNG PRIOK TAHUN 1984

A. Kehidupan Sosial Keagamaan

Kesadaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa mulai tumbuh, nasionalisme mulai menjadi alat penting di dalam memperkuat rezim pemerintah dan penataan sosial. Satu kesadaran penting pada saat itu dan kemudian berlanjut secara lebih tegas pada Masa Orde Baru adalah; integrasi sosial hanya mungkin dicapai dalam masyarakat yang homogen. Nasionalisme kemudian berarti penyamaan (penyelarasan) kehidupan dalam segala aspeknya untuk menuju pada suatu tatanan yang bersifat total.¹

Sejak tahun 1960-1980-an Indonesia mengalami peningkatan penting dalam keikatan rakyat di bidang keagamaan. Pada tahap-tahap pertama pelaksanaan Orde Baru banyak pemimpin Islam yang berpikir bahwa kehancuran PKI ahirnya akan memberi mereka pengaruh politik, tetapi mereka segera menyadari akan hayalan itu. Kaum Muslimin yang shaleh kemudian mencurahkan tenaga mereka ke dalam usaha-usaha pendidikan, kesejahteraan, dan dakwah, dan dengan demikian mereka berharap

¹ Ki Suprioko, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Persepektif Sejarah* (Direktorat Jendral Kebudayaan; 2005) hal 175.

memperkuat pengaruh Islam terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya ialah mendalamnya keikatan yang tulus dan luas dari kaum muslim terhadap agama mereka.²

Dalam Islam dan agama-agama lainnya, terutama Keristen, terlihat adanya beberapa kecendrungan penting di Indonesia. Ketegangan dan konflik yang menandai hubungan antar agama di beberapa daerah pada ahir tahun 1960-an berubah menjadi peningkatan toleransi dan sikap saling hormat-menghormati pada tahun 1970-an dan 1980-an khususnya Masyarakat Tanjung Priok mengalami peningkatan dalam hal gotong royong dan sikap saling hormat-menghormati antar umat beragama³

B. Keadaan Sosial Politik

1. Penekanan Terhadap Partai Politik Islam

Tugas pertama Orde Baru adalah memilih kelompok elite regional yang dapat diandalkannya. Pada ahir tahun 1960-an para pemimpin muslim setempat, bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan rezim Orde Baru sebab mereka sama-sama menentang komunisme. Di beberapa daerah dimana Islam secara relatif kuat, tokoh-tokoh seperti itu dan para pendukungnya dengan segera memperoleh kedudukan di pemerintahan

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Hal 435-436.

³ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Nasional* (Jakarta; Pustaka Alvabet, 2010) hal, 61

daerah. Secara politis, sambutan ini hanya hangat di permukaan. Diterapkannya kebijakan Fabian Strategy merupakan sebuah kebijakan pemerintah Orde Baru, yang pada mulanya bertujuan untuk mengondisikan sikap ulama dan santri agar tetap mendukung kebijakannya, dengan cara tetap memberikan izin partai politik Islam untuk tetap aktif. Setelah terlihat kekuatan dan peranannya baru partai tersebut dihentikan aktifitasnya. Antara lain dengan cara mengizinkan untuk sementara waktu, didirikannya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi/PMI) pada 20 Februari tahun 1968.⁴

Parmusi dijadikan sebagai pengimbang hasil Muktamar Partai Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan terlebih dahulu Juli 1967 di Bandung. Muktamar ini berhasil melahirkan kepemimpinan baru, Ketua Umum tetap Dr. K.H. Idham Chalid, dan ketua I s/d IV terdiri dari H.M. Subhan Z.E, H.A. Sjaichu, H. Djamaluddin Malik dan Imron Rosjadi S.H. Dengan bergabungnya H. Djamaluddin Malik sebagai wirausahawan, terbayang akan semakin kuatnya Partai Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Partai Nahdlatul Ulama dihadapkan kepada kebijakan mengahiri eksistensinya sebagai partai politik. Dikembalikan ke Khittah 1926 M, menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama dan menerima Asas Tunggal Pancasila,

⁴ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah2* (PT. Grafindo Media Pratama; Jakarta: 2009) hal 480-490

dan massa Nahdliyin diubah menjadi pendukung utama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.⁵

Partai Muslimin Indonesia pada awalnya diizinkan untuk didirikan dengan syarat ketua umumnya adalah Djarnawi Hadikusumo dari persyarikatan Muhammadiyah. Dibantu dengan Agus Sudono dari Gasbindo dan J. Naro, S.H. dari Al-Waslijah sebagai ketua. Bukan ketua dan pengurusnya dari mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Namun, setelah pemerintah militer Orde Baru merasa sudah tidak dapat bekerja sama lagi dengan mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi maka pemerintah Orde Baru memberhentikan aktifitas partai tersebut.⁶

Walaupun demikian, Brigdjen Ali Moertopo menilai beberapa pimpinannya sebagai kelompok fundamental Islam, tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah militer Orde Baru. Namun, akibat Brigdjen Ali Moertopo mendasarkan pemikirannya dari hasil penelitian CSIS yang pimpinannya dari Katolik maka digunakan Istilah tersebut untuk menamai kelompok Garis Keras Islam Masjumi, kaum fundamentalis karena dinilai mempunyai kemiripan karakter kerasnya sama dengan kelompok garis keras Protestan. Dipraktikannya Fabian Strategy, terhadap umat Islam terlihat sembilan bulan kemudian, Parmusi atau PMI, mengadakan Muktamar Parmusi, tanggal 2-7

⁵ Suryanegara, *Api Sejarah2* . hal 480-490

⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular* (Mizan; Jakarta:2007) hal 434.

November tahun 1968 yang diadakan di tempat Pondopo Kabupaten Malang. Kota Malang saat itu, berubah menjadi Samodra Bulan Bintang dengan berbagai warna. Bulan Bintang Merah, Bulan Bintang Hijau, dan Bulan Bintang Biru. Yang biasanya hanya Bulan Bintang Putih, atau Hijau. Mukhtar Partai Musimin Indonesia Parmusi atau PMI, mendapat dukungan pemuda dari Komando Keamanan Mahasiswa (KOKAM) dengan baret kuning dan jaket coklat, sebagai Badan Keamanan Mukhtar.⁷

Mukhtar Parmusi dua hari kemudian, dihadiri Brigjen Ali Moertopo kepala operasi khusus (Opsus), badan rahasia di bawah langsung Djendral Soeharto. Menyatakan bahwa Presiden Djendral Soeharto, tanggal 31 Oktober tahun 1968, mungkin membolehkan Dr. Anwar Harjono dan H. Hasan Basri dalam pimpinan PMI. Mukhtar Parmusi di Malang, dihadiri oleh 202 cabang dari seluruh Indonesia. Dalam Mukhtar disampaikan calon ketua terdiri dari dua alternatif. Pertama, Trio Natsir-Prawoto-Roem. Kedua, Trio Anwar Harjono-Hasan Basri-Sarif Usman. Tepat pada tanggal 5 November tahun 1968, Selasa Pahing, tanggal 13 Sya'ban tahun 1388, jam 11:29 secara aklamasi memilih Mr. Mohammad Roem sebagai Ketua Umum. Ketua I s/d IV adalah Dr. Anwar Harjono S.H., H. Hasan Basri, H. Djarnawi Hadikusumo dan Ir. Umar Tosin. Sekretaris Umum Drs.

⁷ Suryanegara, *Api Sejarah* . hal 480-490

Hasbullah. Dibantu oleh Sekretaris I dan II, Drs. Lukman Harun dan Muhammad Sulaiman.⁸

Namun, keputusan Mukhtar tersebut ditolak oleh Djendral TNI Soeharto Presiden Republik Indonesia dengan menulis pernyataan sebagai berikut :

Tokoh-tokoh Masjumi jangan sampai duduk dalam pimpinan PMI. Selagi saja berkuasa, saja tidak segan-segan membekukan PMI. Selain itu, Pimpinan Rkjat, pimpinan Sakti Alamsjah, tanggal 22 November tahun 1986, Djumat Wage, 1 Ramadhan 1388, mengangkat penegasan kembali Presiden Soeharto bahwa “Amnesti terhadap perseorangan pimpinan Masjumi yang terlibat PRRI, tidak berarti pemerintah membenarkan upaya merehabilitasi partai politik Masjumi.” Selanjutnya Mimbar Demokrasi, No. 60 Tahun II, Minggu ke III November 1968, pimpinan Adi Sasono dari Jalan Braga 40 A Bandung, dengan adanya keputusan Mukhtar Parmusi atau PMI seperti tadi, memberitakan pada tanggal 5 November tahun 1968, jam 15:00, datang surat dari Asisten I Urusan Intelligence Kasdam VIII Brawidijaja yang ditunjukan kepada Muhammad Roem. Kemudian 7 November 1968, disusul dengan Radiogram Sekneg, Major Djendral Ratu Alamsjah Prawiranegara, a.l yang menyatakan sebagai berikut : Bapak Presiden, Pemerintah pada saat ini memandang belum waktunya adanya

⁸ Suryanegara, *Api Sejarah2* . hal 480-490

perubahan susunan pimpinan PMI sesuai dengan keputusan Presiden RI No 70 Tahun 1968 Tanggal 20 Februari 1968. Apabila ada perubahan pimpinan yang bertentangan dengan keputusan Presiden No 70 Tahun 1968, berarti suatu pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah.⁹

Ditolaknya keputusan Mukhtar Parmusi atau PMI di Malang yang menetapkan Mohammad Roem, mantan Pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi, sebagai Ketua Umum, menimbulkan berbagai reaksi antara lain : Dr. Mohammad Hatta yang mempunyai nasib sama dengan Parmusi, Partainya Partai Demokrasi Islam Indonesia – PDII ditolak oleh Pd Presiden Djendral Soeharto, Juli tahun 1967. Dalam ceramahnya di Dewan Keluarga Masjid Istiqamah Jalan Taman Citarum Bandung, 21 Sja'ban 1388, Kamis Manis, tanggal 13 November tahun 1968, dalam menjawab pertanyaan wartawan antara, Dr. Mohammad Hatta antara lain menyatakan ingin membentuk kader partai. Dan menyatakan bila Indonesia sebagai negara Demokrasi, Presiden Soeharto tidak benar campur tangan terhadap hasil Mukhtar Parmusi. Tentu, pandangan ini berbeda dengan penafsiran Demokrasi oleh Musjawarah Komando Musko, Kopkamtib, Pangdam, serta pelaksana khusus laksus: tindakan pemerintah menolak hasil keputusan Mukhtar Parmusi justru sebagai upaya pemerintah menegakan Demokrasi

⁹ Suryanegara, *Api Sejarah* . hal 480-490

yang sehat dalam pelaksanaan, ditinjau dari keamanan dan ketertiban. Tanpa keduanya demokrasi yang sehat hanya jadi angan-angan.¹⁰

2. Penetiban Partai Politik dan Diaplikasikannya Dwi Partai

Setelah penertiban Parpol dengan hanya diizinkan dua sistem partai, PPP dan PDI, Januari tahun 1973, setahun kemudian meledakan demo mahasiswa bersama rakyat yang disebut oleh pemerintah sebagai Peristiwa Malari, Malapetaka Januari, tanggal 15 Januari tahun 1974. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kedatangan P.M. Tanaka dari Jepang. Menurut Jenderal Yoga Sugomo, demo Malari ini dikendalikan oleh kelompok Rahmadi yang bertujuan mengadakan perubahan politik dengan menyegarkan kabinet. Untuk sementara mempertahankan Soeharto sebagai Presiden. Ternyata, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib, Jenderal Soemitro, bahwa yang disebut kelompok Rahmadi adalah orang dekatnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Terdiri dari Letjen Suadi, bekas Dubes Etiopia, laksamana muda Mardanus, mantan Menteri Perindustrian dan Maritim, dan Puguh. Dalam dokumen yang diketemukan oleh Pangkoptamtib Soemitro, menokohkan Jendral Soemitro sebagai rival Presiden Soeharto.¹¹

¹⁰ Suryanegara, *Api Sejarah* . hal 480-490

¹¹ Suryanegara, *Api Sejarah* . hal 496-500

Demikian penjelasan dari Jendral Soemitro kepada Dr. Anwar Harjono S.H. namun, pihak kelompok Rahmadi menyebarkan pemberitaan diluar, demo Malari didalangi oleh Masjumi dan PSI. Walaupun sudah 14 tahun Masjumi dibubarkan, 1960-1974 M, namun tetap dijadikan isu dalam demo. Sekali lagi, sejarah mengajarkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kecuali kesamaan kepentingan yang abadi. Setelah kondisi PKI teratasi, bergantilah sasarannya. Di bawah penguasa militer Orde Baru, Komando Operasi Penertiban Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib, Jendra Benny Murdani dan Admiral Soedomo keduanya non Islam, dan Ali Moertopo sebagai Ketua Badan Intelijen – Bakin, terjadilah pembalikan situasi. Dakwah Ulama dan BKPMI serta aktivitas mantan pimpinan KAMI dan KAPPI dihadapkan tuduhan anti Pancasila dan tindakan pelanggaran hukum subsersif. Sementara masjid sebagai pusat ibadah umat Islam, dan kampus tidak luput dicurigai tempat gerakan anti pemerintah.¹²

Pemerintah Orde Baru dalam mengoprasikan Ideologi Pancasila dan UUD tahun 1945, terjadi penafsiran yang menyimpang menurut Mashudi dalam Mamandu Sepanjang Masa, setelah Kolonel Ali Moertopo dan Kolonel Soedjono Hoemardani sebagai Sekpri, terjadilah ketegangan hubungan antar pimpinan Orde Baru. Jendral Nasution dengan tindakan koreksinya dinilai sebagai penghambat. Presiden Soeharto menjawab bahwa

¹² Suryanegara, *Api Sejarah* . hal 496-500

dalam menjalankan roda eksekutif memerlukan pendamping. Namun, karena adanya tuntutan demo mahasiswa maka kedua Sekri tersebut ditiadakan. Akibat lanjutnya timbulah gerakan koreksi terhadap Orde Baru yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD tahun 1945. Koreksi Petisi 50 ini dinilai oleh Presiden Soeharto sebagai kelompok orang yang menurut pepatah Jawa, “*rumangsa bisa nangis ora bisa rumangsa (mengaku bisa tapi sebenarnya tidak bisa)*” – mereka bisa tetapi sebenarnya tidak memiliki perasaan. Maksudnya merasa mengerti, bagaimana mengaplikasikan Pancasila dan UUD tahun 1945. Namun dari sistem koreksinya, menggambarkan ketidakbisaannya. Demikian penjelasan Presiden Soeharto, tahun 1989, dalam “Soeharto Pikir, Ucapan, dan Tindakan Saya”.¹³

Di sisi lain, represi dan provokasi, menimbulkan gerakan perlawanan secara fisik. Antara lain, Peristiwa Tanjung Priok, tanggal 12 September tahun 1984. Dari peristiwa ini ditangani secara militer, sebagai pelaksanaan Blitzkrieg Strategy, akibatnya banyak korban yang berjatuh, antara lain Amir Biki gugur. Juga dilakukan penangkapan tanpa disertai pengacara dengan dihadapkan ke pengadilan. Tindakan selanjutnya, untuk meredakan api dalam sekam, Pangkopkamtib mendekati Majelis Ulama Indonesia agar ikut serta mendinginkan situasi yang memanas setelahnya.¹⁴

¹³ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 496-500

¹⁴ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 496-500

Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 mengundang perhatian Petisi 50. Kemudian, membentuk Panitia Kecil diketuai oleh H.R. Dharsono, dan anggotanya Sjafaruddin Prawiranegara, Slamet Bratanata, Anwar Harjono, dan A.M. Fatwa. Dikeluarkanlah lembaran putih koreksi kesalahan pemerintah yang menyimpang dari UUD tahun 1945 dan Asas Tunggal Pancasila. Namun, hasilnya ketiga penandatanganan Lembaran Putih, yakni Ir. H. M. Sanusi dijatuhi hukuman 19 tahun dengan tuduhan mendalangi peledakan bom BCA, Jembatan Metro dan Gelodok. A. M. Fatwa dihukum 18 tahun. H. R. Dharsono mantan Pangdam VII Siliwangi dijatuhi hukuman 7 tahun.¹⁵

Memasuki tahun 1984 M, mantan pimpinan Masjumi dijadikan sasaran tuduhan dari segenap peristiwa yang dinilai pemerintah Orde Baru tidak benar. Kelompok Petisi 50 dituduh oleh Kepala Bakin Yoga Soegomo, melakukan Kudeta Konstitusional. Dituduh akan mengubah ideologi Pancasila.

Namun, praktik dan strategi Kopkamtib Jendral Benny Murdani dan Admiral Soedomo, menjadikan para Ulama, Santri Usrah, mantan aktivis KAPPI, KAMI, Dosen, Hakim, Menteri dan Jendral yang dikebiri aktivitasnya atau ditangkap dengan berbagai tuduhan. Seperti penjelasan Jendral Prn. TNI AD Dr. A. H. Nasution sebagai alumni Unpad, dilarang

¹⁵Suryangara, *Api Sejarah* 2. hal 496-500

memberikan taushiyah Maulid Nabi 1400 H di Masjid Al-Jihad Universitas Padjadjaran.¹⁶

Bangkitnya kembali gerakan NII, tidak luput dari rekayasa Ali Moertopo. Dengan memanfaatkan tenaga mantan NII, Ali Moertopo akan menggulingkan Presiden Soeharto. Apabila berhasil maka akan dibantu pembentukan NII dan Ali Moertopo sebagai Presidennya. Ali Moertopo sebagai pimpinan Operasi Khusus Opsus, dalam melaksanakan rekayasanya, dibantu oleh: Kolonel Ngairan dan Kolonel Gijanto pencari dana di dalam dan di luar negeri. Di bidang oprasi dibantu oleh Kolonel Sumardan. Ali Moertopo selalu menuding mantan pimpinan Masjumi dan G.P.I.I. sebagai dalang gerakan anti Pancasila dan mencoba menggulingkan Presiden Soeharto. Ali Moertopo dengan rekayasanya, berupaya menjadikan mahasiswa dan umat Islam tidak simpati kepada Presiden Soeharto. Sebaliknya, agar Presiden Soeharto menjauh dari umat Islam dan tidak dekat dengan mantan pimpinan Masjumi sekalipun bersikap kooperatif dan akomodatif.¹⁷

3. Larangan Memakai Kerudung Bagi Anak SMA

Upaya memadam cahaya ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan didukung oleh Benny Moerdani, dijawab oleh Masjid Salman

¹⁶ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 496-500

¹⁷ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 496-500

yang dipimpin oleh Prof. Sadeli, Dr. Ir. Immamuddin, Enang Saifuddin Anshary M.A., Prof. Dr. Syarif, Prof. Dr. Miftah Farid, dengan membangkitkan gerakan dakwah di kalangan remaja dan pemuda. Terutama dakwah ke mahasiswa, dengan mengadakan semacam kursus. Untuk menanganinya diserahkan kepada Karisma – Keluarga Remaja Islam Salman.¹⁸

Selain mengadakan pembelajaran baca Al-Qur'an untuk remaja, juga mengadakan latihan Mujahid Dakwah – LMD. Kemudian, diadakan pula Studi Islam Intensif – SII. Dalam hal ini ditangani oleh Dr. Ir. Yan Orgianus. Dengan bergabungnya Anne Rufaidah dari Seni Rupa ITB ke Karisma, lahirlah rancangan busana Muslimah. Dengan menjadikan putri-putri atau akwat Karisma sebagai pemakai hasil rancangan busana Muslimah, mulailah kaum ibu dan remaja putri Masjid Salman dan mahasiswi ITB mengenakan busana Muslimah berkerudung jilbab. Akibat karisma juga mengadakan Bimbingan Belajar untuk siswa-siswa SMA Negeri atau Swasta, mulailah keruung jilbab masuk ke SMA di Jawa Barat. Pengaruhnya bagi SMA Swasta tidak bermasalah busana sergama SMA dengan berkeruung jilbab. Pengembangan selanjutnya digerakan Mbak Rina dari Teknik Informatika

¹⁸ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 504-505

ITB, meluas hingga melahirkan “Samodra Jilbab” di kalangan para siswi dan mahasiswi di Bandung.¹⁹

Tidaklah demikian halnya dengan SMA Negeri 3 Bandung. Kepala Sekolahnya, menilai siswi yang berkerudung jilbab, melanggar janji taat aturan disiplin sekolah dan seragam sekolah. Termasuk masalah kesediaan mengenakan busana olah raga. Pelanggaran ini diperingatkan dengan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di dalam kelas, masih diizinkan berada di luar kelas. Namun, karena para siswi yang berkerudung jilbab tetap tidak bersedia membukanya, dikenakan hukuman dikeluarkan dari SMA Negeri 3. Tindakan yang sama dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri di Jakarta.²⁰

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daud Yusuf dalam menegakan disiplin sekolah sama pola strateginya dengan Ali Moertopo dan Benny Moerdani. Apabila di sekolah atau di kampus Perguruan Tinggi berkembang kehidupan Islamnya, Kepala Sekolah atau Rektor harus bertanggung jawab. Pembusanaan jilbab harus dikenakan wajib foto untuk ijazahnya atau keterangan yang diperlukan adanya foto, harus tampak telinga pada foto setengah badannya.²¹

¹⁹ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 504-505

²⁰ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 504-505

²¹ Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 497-498

Selain itu aktivitas di Masjid Salman ITB, pada masa Orde Lama tidak mendapatkan tekanan seperti masa Orde Baru yang dilancarkan oleh sebagian pimpinan militer Ali Moertopo, Benny Moerdani, dan Soedomo. Tekanan terhadap aktivitas dakwah Islam di Masjid Salman, menjadikan Prof. Dr. Miftah Farid berlangganan mendekam di Laksus untuk diintrogasi.²²

4. Larangan Melakukan Tausyah Atau Ceramah Tanpa Izin

Benny Moerdani sudah terkenal sebagai seorang pencipta komplotan melawan musuh Presiden Soeharto, khususnya mereka yang ada di “Pihak Kanan” yaitu Islamis. Tidak ada yang lebih giat ditindas dari pada kaum Komunis. Tetapi dari ahir tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1980-an kalangan Islamis militant merupakan sasaran kedua utama dari tindakan keras Presiden Soeharto melalui angkatan bersenjata. Mantan pemimpin Masyumi tidak diizinkan untuk kembali ke panggung politik. Pimpinan Muslim lainnya yang dianggap terlalu independen, dibersihkan. Surat kabar harian Islam ditutup atau diambil alih. Penghotbah di Masjid dipantau dengan cermat dan dapat diintrogasi. Meskipun keadaannya begitu, “Ketakutan Pada Hijau” muncul secara luas ketika pimpinan rezim

²²Suryanegara, *Api Sejarah 2*. hal 497-498

membesar-besarkan ancaman Kultus Islam, yang sebenarnya kecil dan sangat dilokalisir, supaya dibenarkan untuk menindas mereka.²³

Sejak awal Orde Baru, kekerasan melandasi langkah sentralisasi. Kurangnya perlawanan terbuka di daerah terhadap usaha rezim tersebut guna memaksakan penguasaan pusat mencerminkan kemauan Orde Baru untuk menjalankan kebijakannya. Terutama bagi daerah-daerah dimana PKI pernah menjadi yang paling kuat, sehingga para penguasa baru negara ini sama sekali tidak mentolerir perlawanan. Hampir semua provinsi tersebut berada di Jawa dan Bali.²⁴

C. Keadaan Ekonomi dan Budaya

1. Kadaan Ekonomi

Setelah tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, sulit juga mengenang kembali kenyataan merosotnya Indonesia sebelum Orde Baru, kemerosotan yang sekurang-kurangnya berlangsung dalam rentang waktu yang sama. Padahal pada tahun 1967, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita lebih rendah dari PDB pada tahun 1940, sebelum invasi Jepang, dan mungkin sekali juga lebih rendah dari pada tahun 1913, sebelum perang dunia I. Mengenai keadaan Indonesia pada pertengahan tahun 1960-

²³ Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama). Hal, 81

²⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Hal 434-437.

an, vonis keras yang disampaikan seorang ekonom dengan pengalaman tangan pertama, Benjamin Higgins, menggambarkan keadaan menyedihkan kesan suram yang terlihat pula pada penilaian sebagian besar ekonom yang berpengetahuan tentang Indonesia pada waktu itu. Indonesia pada tahun 1966, tulis Higgins, “Pasti harus dianggap sebagai kegagalan ekonomi nomor satu diantara negara-negara besar yang sedang berkembang.”²⁵

Pada paruh pertama tahun 1960-an, ekspor menurun, cadangan devisa menciut sampai nol (tahun 1965), dan inflasi meningkat sampai hampir 600 persen setahun (tahun 1966). Pada pertengahan decade tahun 1960-an itu, lebih dari setengah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan Jawa tergolong “Sangat Miskin”, menyebabkan ahli demografi Nathan Keyfitz menggambarkan pulau yang berpenduduk padat ini sebagai “sesak nafas karena kekurangan tanah”.²⁶

Ternyata keadaan segera berubah kebijakan negara terhadap kondisi yang menyedihkan itu. dari tahun 1965-1968, sewaktu transisi dari Sokarno ke Presiden baru Soeharto, kelalaian terhadap prasarana fisik, kecerobohan fiscal, dan retorika revolusioner dari apa yang disebut “Orde Lama” ditinggalkan oleh rezim Orde Baru”. Pemerintahan baru itu menentukan

²⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Hal 434-437.

²⁶ *Suara Amin Rais Suara Rakyat* (Gema Insani: 1998). Hal, 25-27.

sebagian prioritas utamanya pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.²⁷

Perjalanan ini tidaklah lancar. Panen buruk pada tahun 1967 menyebabkan kenaikan tajam harga beras dalam negeri. Program pemulihan ekonomi diancam kegagalan. Namun krisis itu menunjukkan kepada pemimpin rezim betapa mendesak perlunya memperluas produksi tanaman pangan.²⁸

Kabar buruk ternyata mendorong kebijakan yang baik: dalam rencana pembangunan lima tahun pertama, yang dimulai pada April tahun 1969, pertanian diberi perhatian utama, dan pada pertengahan 1980-an Indonesia telah mampu mencapai tingkat bersembada dalam persediaan beras, perhatian Indonesia terhadap pemeliharaan hasil pertanian dalam negeri benar-benar mengesankan.²⁹

Diantara tahun 1968 dan tahun 1981, perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7 persen setahun. Terutama setelah tahun 1974 ketika harga minyak dunia melonjak dengan cepat, Indonesia menikmati keadaan

²⁷ *Suara Amin Rais Suara Rakyat* (Gema Insani: 1998). Hal, 25-27.

²⁸ Rimsky K. Judisseno. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005) Cet, Kedua. Hal, 111.

²⁹ Sugiono KS., dkk. *Pengatahuan Sosial Sejarah* (Grasindo, Jakarta: 2004). Hal, 121

perdagangan komoditi yang membaik secara berarti yaitu, harga ekspor naik lebih cepat dari pada harga impor.³⁰

Produksi pangan Indonesia meningkat secara mencolok, sebagian besar karena tersedianya bibit yang bertambah baik dan melimpahnya persediaan pupuk. Pandangan yang pesimistis dari banyak ilmuwan bahwa Indonesia pasti menghadapi semacam bencana pangan berubah menjadi optimisme yang hati-hati. Anne Booth telah berusaha untuk mengukur konsumsi beras perkapita sejak pertengahan abad kesembilan belas. Angka-angka yang diperoleh menunjukkan bahwa konsumsi beras turun dari sekitar 106 kg per kapita pada tahun 1850-an menjadi 90 kg pada tahun 1930-an, yang bertambah baik menjadi 95 kg pada tahun 1960-an, menjadi 110 kg lebih pada tahun 1970-an, dan menjadi 140 kg lebih pada tahun 1980-an. Impor beras berkurang menjadi hampir nol dan Indonesia menyatakan telah mencapai kemandirian dalam beras. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, hasil dari kemajuan-kemajuan teknologi, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta inisiatif dan kerja keras para petani Indonesia.³¹

Naiknya penghasilan per kapita tahunan menjadi hampir 600 dolar Amerika menyebabkan Bank Dunia melakukan penggolongan ulang

³⁰ Nana Supriatna, *Sejarah* (Grafindo Media Peratama, 2006) hal, 24.

³¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Hal 434-437.

terhadap Indonesia sebagai suatu negara yang berpenghasilan menengah pada tahun 1982.³²

Program stabilisasi ekonomi yang sangat berhasil. Inflasi per tahun mencapai 600 persen lebih pada tahun 1966; pada tahun 1967 tingkat inflasi turun menjadi 100 persen, pada tahun 1968 menjadi 85 persen, dan pada tahun 1969 turun ketingkat yang luar biasa, yaitu 10 persen. Sebagian besar keberhasilan ini dimungkinkan karena sangat besarnya bantuan luar negeri yang mengalir, terutama melalui kelompok antar pemerintah untuk Indonesia (IGGI: Inter-Governmental Group on Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1966-1967 oleh negara-negara besar non Komunis yang telah memberikan pinjaman kepada Indonesia (terutama Jepang, Amerika, Jerman Barat, Prancis, dan Dana Moneter Internasional).³³

Setelah meletusnya perang Arab-Israel pada bulan Oktober tahun 1973 juga penting sekali bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Harga ekspor Indonesia untuk minyak mentah naik dari 2,96 dolar Amerika per barel pada bulan April tahun 1973 menjadi 4,75 dolar Amerika pada bulan Oktober dan 12,60 dolar Amerika pada bulan Juli tahun 1974.³⁴

³² Nana Supriatna, *Sejarah* (Grafindo Media Peratama; 2006) hal, 24.

³³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Masyarakat Indonesia* (Yayasan Obor Indonesia; 2006). Hal, 80.

³⁴ Sugiono KS., dkk. *Pengatahuan Sosial Sejarah*. Hal, 121

2. Budaya

Masyarakat Tanjung Priok yang heterogen terdiri dari berbagai agama dan adat istiadat yang berbeda. Tentu, banyak memiliki keragaman budaya. Kebudayaan yang masih kental dan sering kita jumpai di masyarakat Tanjung Priok yaitu; asas kebersamaan dan gotong royong, saling membantu satu sama lain, serta toleransi yang tinggi antar umat beragama. Masyarakat Tanjung Priok juga dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan religious, sering mengadakan acara-acara peringatan agama. Bagi umat Islam yang ada di Tanjung Priok khususnya, sering mengadakan acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad Saw. Serta tradisi pembagian angpau bagi umat katolik atau kongchou, dan penggunaan bahasa Betawi.³⁵

³⁵ Penjelasan dari hasil wawancara dengan bapak. Ahmad Sahi sebagai narasumber sekaligus pelaku sejarah “peristiwa Tanjung Priok tahun 1984”. Lokasi kampong Koja, gang 4 Koja, Kelurahan Koja, RT 01/RW 05, Jalan Pelabuhan.